

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pada era reformasi saat ini, perkembangan teknologi dan ekonomi di berbagai negara pasti membutuhkan pemerintah yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance*. Peningkatan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong berbagai sektor pemerintahan untuk menerapkan akuntabilitas publik yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam upaya efektifitas dari sebuah laporan keuangan yang berkualitas dan ditujukan kepada khalayak umum (Marlinawati dan Wardani, 2018). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. (Kusumastuti, 2014).

Upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam proses pengelolaan keuangan maupun dalam penyampaian laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan pemerintah, terbukti dengan adanya reformasi di bidang keuangan di Indonesia dengan diterbitkannya serangkaian Undang - Undang tentang pengelolaan keuangan negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, lalu kemudian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan yang terakhir UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang sudah diterbitkan harus disusun

berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang disusun telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah dan menghasilkan nilai informasi yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor.

Nilai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Untuk itu, perlu adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terkait dengan laporan keuangan merupakan proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang memberikan nilai informasi. (Hanum, 2019).

Selain itu, Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Semakin maju teknologi informasi saat ini sangat berpengaruh terhadap bidang akuntansi (Nilamsari et al., 2020). Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah) yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah. Pemanfaatan teknologi informasi memudahkan pemerintah dalam memberikan layanan ke publik. Menurut Ardianto

dan Eforis (2019) adanya teknologi informasi tentu dapat memberikan kemudahan kepada organisasi, proses akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara komputerisasi serta komputer yang didukung dengan penggunaan aplikasi (*software*) dapat meminimalisir kesalahan pencatatan. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan *software* akuntansi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) internal pemerintah daerah DKI Jakarta yang dapat mempermudah dalam menyusun laporan keuangan yang akan disajikan kepada masyarakat.

Selama 5 tahun berturut-turut, Provinsi DKI Jakarta memperoleh Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun anggaran 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Opini WTP yang diterima oleh DKI Jakarta mencerminkan konsistensi untuk dapat terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di DKI Jakarta.

Tabel 1. 1 Daftar Opini BPK

Tahun	Opini
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP

Sumber : www.jakarta.bpk.go.id

Namun demikian, opini WTP yang diberikan BPK atas laporan keuangan tersebut bukan berarti bahwa laporan keuangan tersebut telah bebas dari kesalahan dan kelemahan. BPK perwakilan provinsi DKI Jakarta menemukan beberapa permasalahan yang perlu segera dibenahi. Permasalahan yang masih ada dalam laporan keuangan DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Tidak Andal

Pentingnya peningkatan monitoring dan pengendalian intern atas pengelolaan rekening kas pada organisasi perangkat daerah dan Bank DKI Jakarta, sehingga tidak terjadi permasalahan adanya penggunaan rekening kas dan rekening

penampungan (*Escrow*) yang tidak memiliki dasar hukum dan tanpa melalui persetujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

2. Tidak Relevan

Kelemahan di proses pendataan penetapan dan pemungutan pajak daerah yang mengakibatkan kekurangan pendapatan pajak daerah.

3. Tidak Andal, Relevan dan Dapat dibandingkan

Kelebihan pembayaran gaji tunjangan daerah/TKD/TPP, kelebihan pembayaran barang dan jasa, serta kelebihan atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.

4. Tidak Relevan dan Tidak Mudah Dipahami

Pemenuhan kewajiban koefisien lantai bangunan (KLB), pencatatan aset tetap ganda, aset tetap belum ditetapkan statusnya serta aset tetap tidak diketahui keberadaannya.

Dari beberapa hasil penemuan BPK tersebut tidak menyebabkan kerugian negara dan secara materiil tidak berpengaruh terhadap kewajaran serta opini BPK mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Bukan hanya DKI Jakarta yang terdapat temuan permasalahan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, di provinsi-provinsi lain atau instansi/lembaga lain pun tentunya akan terdapat temuan permasalahan. Hal tersebut tentunya akan dijadikan sebagai bahan acuan untuk perbaikan agar pemerintah lebih memperhatikan nilai informasi dari laporan keuangan dengan baik

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sehingga masih diperlukan pembenahan terhadap sistem kerja pada pegawai pemerintah terutama pada penatausahaan keuangan agar kualitas nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan bermanfaat serta bernilai akurat (Lestari dan Dewi, 2020). Kemudian peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang saat ini diperkuat Provinsi DKI Jakarta sehingga bisa mempertahankan predikat WTP tersebut.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh nilai informasi laporan keuangan pemerintah, diantaranya yang dilakukan oleh Armando (2013),

Hanum (2019) dan Sartika et al., (2014) yang membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Hal ini mendukung penelitian Ariesta (2013) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian Pramudiarta dan Juliarto (2015) dengan variabel yang sama didapat hasil yang berbeda, dimana sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan, tetapi pada pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Indriasari (2008), Rita dan Amalia (2014), dan Satria (2020) menyatakan bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Pada penelitian yang dilakukan Agustin et al., (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan, tetapi sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Dan penelitian yang dilakukan Dewi dan Rini (2018) menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan tidak signifikan, tetapi sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Fenomena mengenai nilai informasi laporan keuangan menarik untuk dikaji lebih dalam. Kenyataannya didalam laporan keuangan masih terdapat permasalahan meskipun permasalahan itu tidak mempengaruhi Opini WTP yang sudah didapat oleh Pemerintah DKI Jakarta terhadap laporan keuangan tahun 2021. Tetapi dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan mampu mengevaluasinya. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kepada pengguna laporan keuangan tentang sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta apakah sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka penulis tertarik dan terdorong untuk meneliti lebih lanjut tentang pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah serta pemanfaatan teknologi informasi yang berdampak pada nilai informasi laporan keuangan pemerintah dengan judul: **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah”**.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Berpengaruh Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah?

1. 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Simultan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.

1. 4. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan memiliki manfaat bagi semua pihak yang membaca ataupun secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini, diharapkan nantinya dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui arti pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini, diharapkan nantinya dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi ataupun tambahan data untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama.